

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Hasil analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Variabel Pajak Daerah (X1), Retribusi Daerah (X2), dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah (X3) secara simultan berpengaruh terhadap Belanja Modal Pemerintah Kota Kupang.
2. Variabel pajak daerah (X1) tidak berpengaruh terhadap belanja modal, retribusi daerah (X2), dan Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah berpengaruh terhadap belanja modal Pemerintah Kota Kupang.
3. Koefisien Determinasi (R^2) sebesar 0.8403 artinya sebesar 84.03% variabel terikat belanja modal mampu dijelaskan oleh variabel-variabel independen pajak daerah (X1), retribusi daerah (X2), lain-lain pendapatan asli daerah yang sah (X3). Sedangkan 15,97 persen sisanya dijelaskan oleh variabel-variabel yang tidak dimasukkan ke dalam model. Nilai Adjusted R^2 tersebut menunjukkan hubungan yang kuat antara variabel dependen dan independen yang mempengaruhinya.

6.2 Saran

Dari hasil penelitian, maka diberikan saran sebagai berikut

1. Kepada Pemerintah dinas pendapatan daerah (Dispenda) diharapkan terus menggali pendapatan asli daerah sehingga penerimaan pajak daerah, retribusi daerah dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah selalu meningkat.
2. Kepada pemerintah dinas pendapatan daerah diharapkan terus menggali potensi yang ada dengan tetap memperhatikan aspek keadilan dan kepentingan umum sehingga program yang dilaksanakan dari hasil pendapatan asli daerah lebih berdampak langsung bagi masyarakat.
3. Peneliti berharap, untuk penelitian selanjutnya mampu memberikan dan mengembangkan penelitian dan mengembangkan variabel variabel bebas terkait dengan pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap belanja modal Pemerintah Kota Kupang.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Afiah, Nur, Nunuy. 2010. Akuntasi Pemerintahan Implementasi Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah. Badan Penerbit Kencana.
- Bastian, Indra.2009. Sistem Perencanaan dan Penganggaran Daerah di Indonesia. Badan Penerbit Salemba Empat. Jakarta.
- Bastian, Indra. 2010. Akuntasi Sektor Publik Suatu Pengantar. Badan Penerbit Erlangga.
- Ghozali, Imam.2009. EkonomitrikaTeori Konsep dan Aplikasi dengan SPSS 17. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.
- Mursyidi. 2009. Akuntasi Pemerintahan di Indonesia. Badan Penerbit PT Refika Aditama Bandung.
- Mahmudi.2015. Manajemen Keuangan Daerah.Badan penerbit Erlangga.Jakarta
- Sujarwени, Wiratna. 2018. Metodelogi Penelitian Bisnis dan Ekonomi Pendekatan Kuantitatif Pustaka baru prees. Yogyakarta.
- Suparmoko, M. 2002. Ekonomi Publik Untuk Keuangan & Pembangunan Daerah.Andi. Yogyakarta.
- Yani, Ahmad.2013.Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia.Edisi Revisi.Jakarta:Rajawali Pers.
- Widarjono,Agus. 2013.Ekonomitrika Pengantar danAplikasinya Disertai Panduan Eviews.Yogyakarta:UPP STIM YKPN.
- Winarno, Wahyu Wing .2007. Analisis Ekonometrika dan Statistika Dengan Eviews. Badan Penerbit Srkolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.

Jurnal

- Hartiningsih, Nina dan H Halim.2015. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Modal Di Provinsi Riau.Jurnal Fakultas Ekonomi, Universitas Riau.
- Priambudi, wimpi.2014. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten Dan Kota Di Pulau Jawa Tahun 2013.Jurnal Prodi Akuntasi, Universitas Negeri Yogyakarta
- Putteri, M. L. Leny Suzan. 2015. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap

Belanja Modal.(Studi Kasus pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung periode 2009-2013).Jurnal Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Telkom.

Susanti, Susi. Heru, Fahlevi. 2016. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi Hasil Terhadap Belanja Modal pada Kabupaten/kota di wilayah Aceh. Jurnal Ekonomi Akuntansi, Universitas Syiah Kuala.

Yuliana. 2014. Pengaruh PendapatanAsli Daerah dan Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Pada Kabupaten/kota di Pulau Sumatera. Jurnal Akuntasi dan Keuangan, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Lampung.

Sumber Lainnya

Badan Pusat Statistik Kota Kupang

UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah

